

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran Pos Satpam Rp 9,1 Juta per Meter

Palmerah, Warta Kota

Anggota DPRD DKI mempertanyakan anggaran pembangunan pos satpam di sekolah sebesar Rp 9,1 juta per meter persegi. Harga tersebut lebih besar dari anggaran pembangunan gedung sekolah yang Rp 5,8 juta per meter persegi.

"Pos satpam itu 1 meter Rp 9,1 juta. Kami bukan mau motong anggaran tapi efisiensi saja. Sebelumnya enggak ada, lalu ini ada, bahkan harganya dua kali rehab gedung sekolah," ucap anggota DPRD DKI Komisi E, Ima Mahdiah dalam rapat anggaran bersama Komisi E di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

(Pit) Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh Hidayat menjelaskan bahwa komponen anggaran tersebut belum

direvisi dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Seharusnya anggaran pembangunan pos satpam sudah berubah menjadi Rp 5,8 juta per meter sesuai harga pembangunan gedung sekolah.

Syaefuloh menilai data yang dibaca Ima Mahdiah belum diperbarui. "Itu belum diganti harga komponennya, sekarang sudah disesuaikan pos satpam 5,8 juta per meter," katanya.

Ima kembali mempertanyakan alasan mahalnya anggaran tersebut. "Tapi masa lebih mahal Pak dari gedung sekolah. Kayak kita enggak tahu aja pos satpam," katanya.

Syaefuloh menyatakan, untuk membangun satu pos satpam total biayanya Rp 45 juta.

Dia telah meminta kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menyesuaikan anggaran yang terbaru.

"Ini saya sampaikan berdasarkan pembahasan komisi terakhir kami minta konsultan hitung ulang. Kami kirim surat ke BPAD untuk penyelesaian," katanya.

Rehab

Pada kesempatan itu, Syaefuloh juga menjelaskan tentang anggaran rehab sekolah. Menurutnya, anggaran tersebut disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Penjelasan ini disampaikan untuk menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang pemangkasan anggaran rehab sekolah.

Program rehab sekolah

awalnya direncanakan menjangkau 191 lokasi. Namun dikoreksi jadi 86 lokasi dan terakhir tinggal 56 lokasi.

"Bukan dipotong, bukan dipangkas, tapi disesuaikan kemampuan keuangan daerah. Artinya kan begini, tentu semua orang ingin bangunan sekolahnya bagus, semua kan mengusulkan. Tapi pada saat kita hanya punya sumber daya yang terbatas, maka kemudian yang kita lakukan adalah prioritas," paparnya.

Ia mengakui, 86 sekolah memang perlu direhabilitasi. Namun ketika dicek ulang, 30 sekolah masih bisa ditunda rehabilitasinya. "Jadi bukan dipangkas, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kemudian itu ditunda," tuturnya. (Kompas.com)